

Katalog/Catalog: 9102067.91



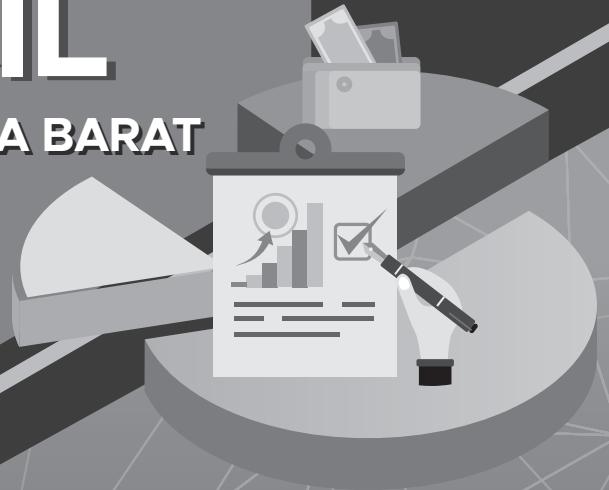
Potensi USAHA MIKRO KECIL



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA BARAT**

Potensi
**USAHA
MIKRO
KECIL**
PROVINSI PAPUA BARAT

<https://publikasi.bps.go.id>



<https://papuabarat.bps.go.id>

**POTENSI USAHA MIKRO KECIL PROVINSI PAPUA BARAT
SENSUS EKONOMI 2016**

No. ISBN: xxx-xxx-xxx-x
No. Publikasi: 03220.1814
No. Katalog: 9102067.91

Ukuran Buku: 20 cm x 20 cm
Jumlah Halaman: vii + 33 halaman

Naskah: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

Penyunting: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

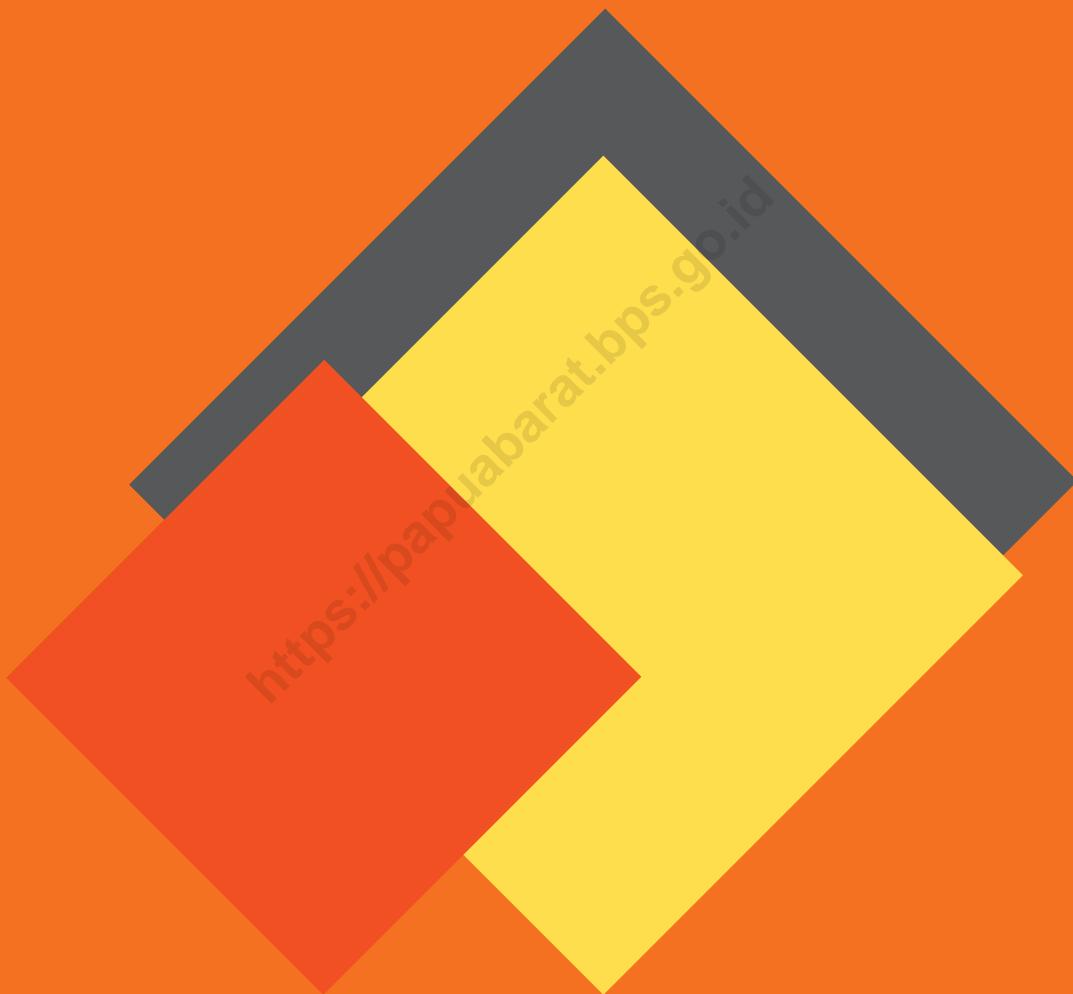
Desain Kover oleh: Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan oleh: © Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat

Tata Letak: Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Sumber Ilustrasi: www.freepik.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik



Kata Pengantar



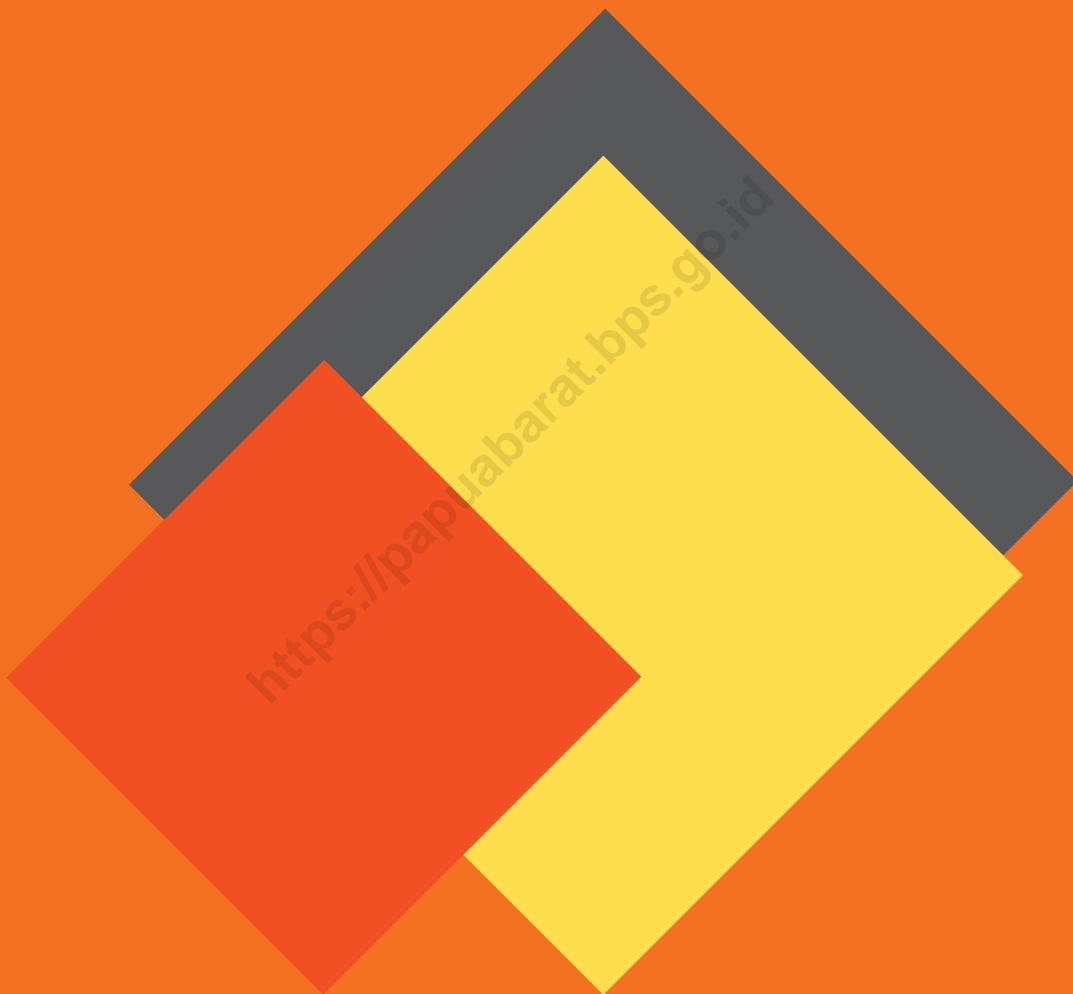
Pada tahun 2016, BPS telah melaksanakan kegiatan pendataan lengkap atau listing Sensus Ekonomi Tahun 2016 (SE2016). Untuk memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai aktivitas Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB), pada tahun 2017 dilakukan SE2016 Lanjutan.

Hasil pendataan SE2016 Lanjutan dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis dan perumusan kebijakan di antaranya untuk mengukur kinerja Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan memberikan gambaran karakteristik/kualitas sumber daya manusia, kondisi aksesibilitas permodalan, prospek usaha, dan kinerja keuangannya. Informasi tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pemerintah untuk membantu pengembangan UMK baik melalui pembinaan maupun penyusunan regulasi yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK. Dengan demikian, peran UMK dalam kegiatan ekonomi lokal semakin kuat. Lapangan pekerjaan pun makin meningkat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyukseskan SE2016-Lanjutan.

Manokwari, Desember 2018
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Papua Barat

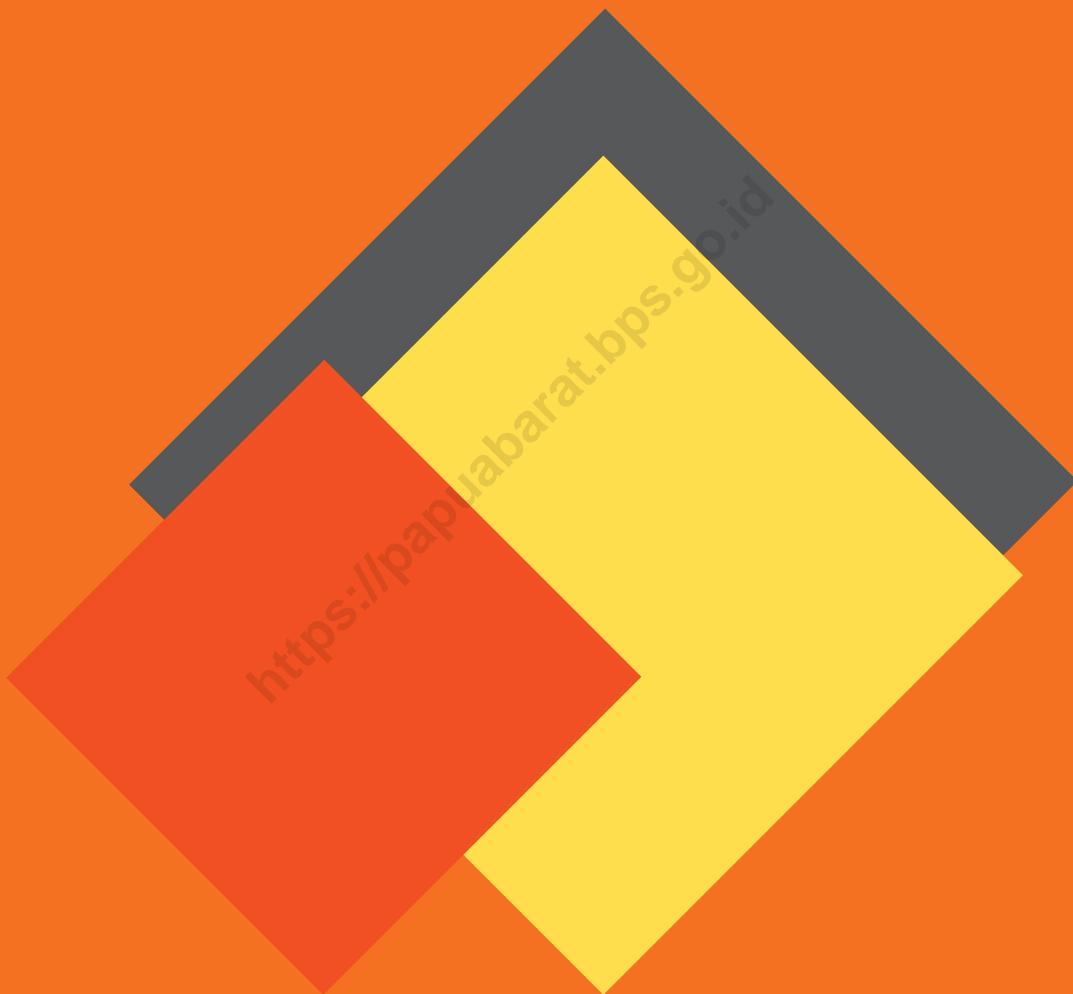
Endang Retno Sri Subiyandani



<https://papuabarat.bps.go.id>

Daftar Isi

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR _____ | III |
| DAFTAR ISI _____ | V |
| PENDAHULUAN _____ | 1 |
| UMK MENDOMINASI JUMLAH USAHA DI PAPUA BARAT _____ | 3 |
| UMK SEBAGAI PENYERAP TENAGA KERJA TERBANYAK _____ | 7 |
| PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA _____ | 11 |
| PELAKU UMK MAYORITAS PERORANGAN _____ | 17 |
| AKSEBILITAS PERMODALAN UMK _____ | 21 |
| KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN _____ | 25 |
| PROSPEK UMK DI MASA MENDATANG _____ | 31 |



<https://papuabarat.bps.go.id>

Pendahuluan

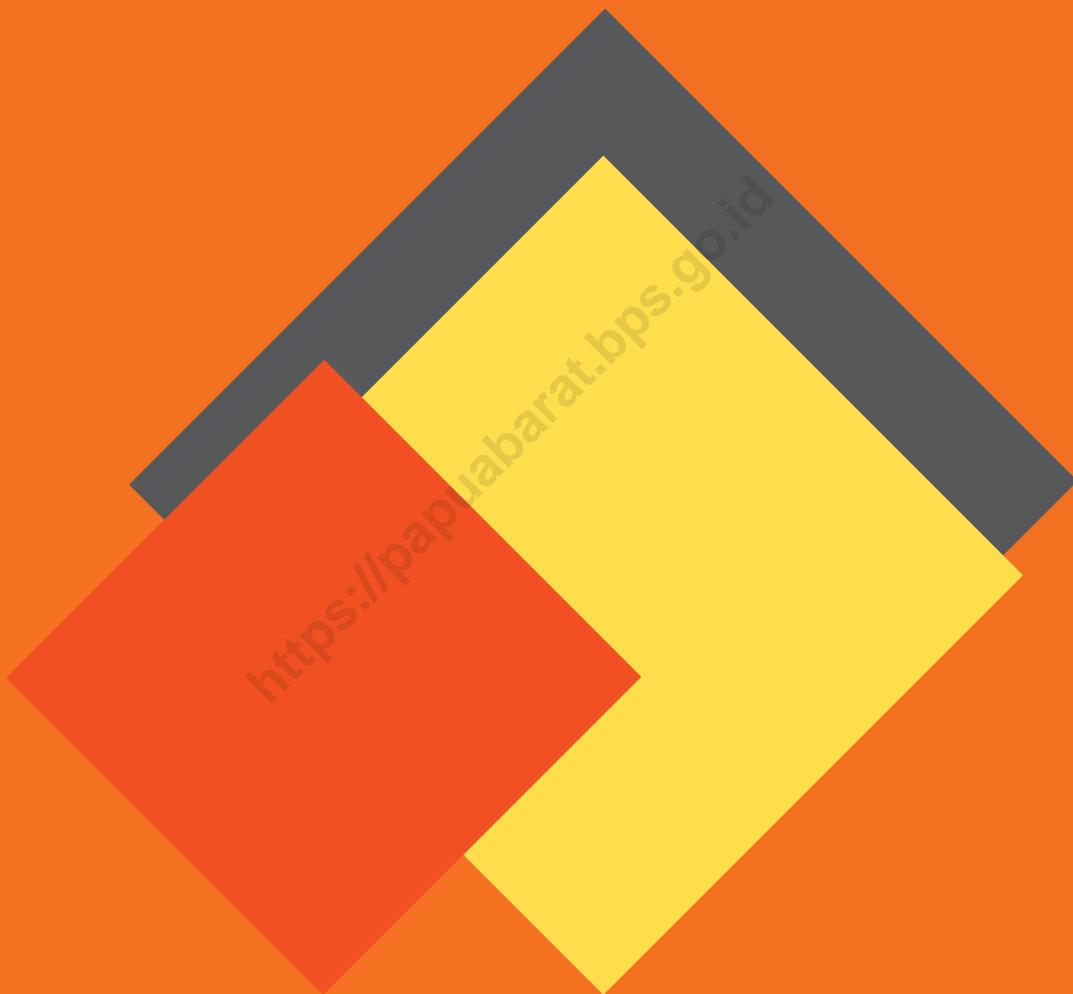
Dunia usaha di Papua Barat pada saat ini masih didominasi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK). Dari hasil SE2016-Lanjutan, jumlah usaha ini mencapai lebih dari 71 ribu usaha atau 98,03 persen dari total usaha nonpertanian di Papua Barat. Usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja Papua Barat lebih dari 191 ribu orang atau sekitar 75,35 persen dari total tenaga kerja nonpertanian. Ketika krisis menerpa Indonesia pada sekitar tahun 1997-1998, UMK terbukti tetap berdiri kokoh di Papua Barat saat usaha-usaha besar lainnya berjatuh.

Keunggulan UMK dalam bertahan dari badai krisis karena berbagai alasan. Pertama, umumnya UMK menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kedua, UMK tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya. Ketiga, umumnya bisnis UMK menggunakan modal relatif rendah. Dengan keunggulan tersebut, UMK tidak begitu merasakan pengaruh krisis global yang biasanya ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah yang dalam.

Meskipun mempunyai beberapa keunggulan, UMK juga mempunyai banyak keterbatasan sehingga usaha ini tidak mampu untuk berkembang. Keterbatasan-keterbatasan tersebut diantaranya minimnya akses perbankan; kemampuan dan pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah; dikelola dengan cara yang sederhana; penggunaan teknologi yang terbatas; dan belum mampu mengimbangi perubahan selera konsumen khususnya yang berorientasi ekspor.

Mengingat pentingnya peran UMK dalam menggerakkan roda perekonomian Papua Barat, hendaknya kendala dan keterbatasan tersebut tidak menyurutkan pelaku UMK untuk mengembangkan usaha dan bisnisnya. Peluang untuk mengembangkan bisnis UMK terbuka lebar jika pelaku UMK mampu membaca situasi pasar. UMK mempunyai peran yang penting khususnya pada usaha-usaha yang memanfaatkan sumberdaya alam maupun padat tenaga kerja.

Untuk melihat potensi dan kinerja UMK saat ini, serta untuk melihat prospeknya di masa mendatang, perlu melakukan analisis kinerja UMK. Hal ini juga bersesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dilakukan melalui pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi. Dengan adanya identifikasi kinerja UMK dan permasalahan yang dihadapi, maka akan memberikan sumbangsih dalam penyusunan regulasi atau kebijakan yang mampu melindungi dan meningkatkan kinerja UMK.



<https://papuabarat.bps.go.id>

**UMK
MENDOMINASI
JUMLAH
USAHA DI
PAPUA BARAT**

Bagian

1

<https://papuabarat.bps.go.id>

UMK mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian Papua Barat. Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan sebagai wadah usaha yang menghasilkan nilai ekonomi. Usaha ini menjadi pilihan utama karena memerlukan modal yang relatif kecil. Oleh sebab itu aktivitas UMK merupakan kegiatan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidup. Dengan kata lain, UMK berperan sebagai dasar pembangunan ekonomi kerakyatan.

Persentase UMK di Provinsi Papua Barat mencapai 98,03 persen dari total jumlah usaha nonpertanian yang tercatat. Jumlah UMK tersebar pada semua kategori nonpertanian. Usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G) mendominasi jumlah UMK dengan jumlah sekitar lebih dari 300 ribu usaha atau mencapai lebih dari 55 persen. Usaha Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum (Kategori I) menduduki peringkat kedua dengan kontribusi lebih dari 14 persen.

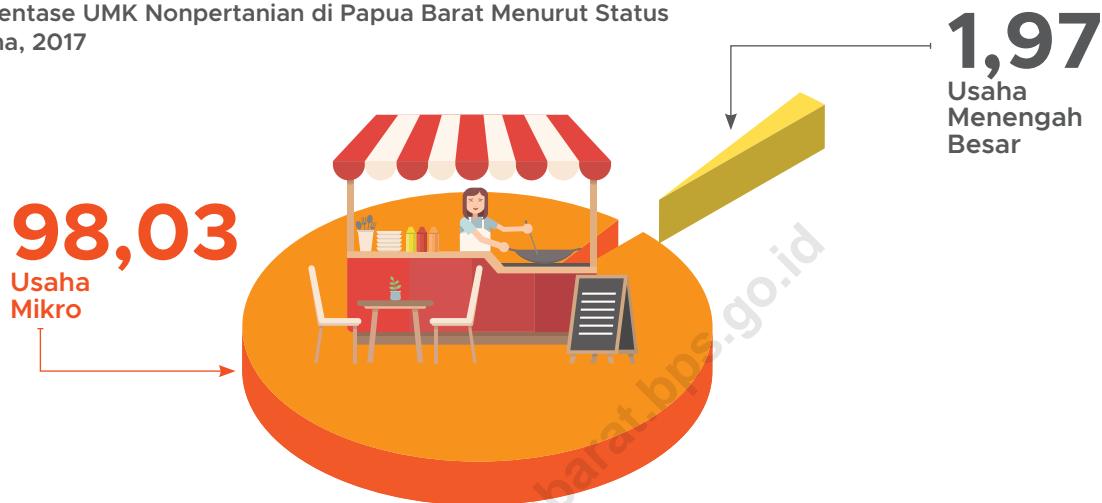
Sebagai Ibu Kota Provinsi, Kabupaten

Manokwari tampaknya masih belum menjadi pusat pergerakan ekonomi di Papua Barat. Hal ini terlihat dari hasil SE2016-Lanjutan yang menunjukkan bahwa jumlah UMK terbanyak didominasi di Kota Sorong yang mencapai 31,16 persen jumlah UMK di Papua Barat. Sementara UMK di Kabupaten Manokwari yang merupakan ibukota Provinsi Papua Barat hanya sebesar 19,85 persen.

Kabupaten dengan UMK terkecil di Papua Barat terdapat di Kabupaten Pegunungan Arfak yang hanya menyumbang 0,75 persen dari total jumlah UMK Papua Barat.

**UMK
MENDOMINASI
JUMLAH
USAHA DI
PAPUA BARAT**

Gambar 1.1.
Persentase UMK Nonpertanian di Papua Barat Menurut Status Usaha, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 1.2.
Persentase Jumlah UMK di Papua Barat Menurut Kategori, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 1.1.
Jumlah dan Persentase UMK Menurut Kabupaten/Kota, 2017

| Kabupaten/Kota | Jumlah | Persentase (%) |
|--------------------|---------------|----------------|
| Fakfak | 4.943 | 6,88 |
| Kaimana | 3.611 | 5,03 |
| Teluk Wondama | 2.629 | 3,66 |
| Teluk Bintuni | 5.304 | 7,39 |
| Manokwari | 14.254 | 19,85 |
| Sorong Selatan | 3.098 | 4,31 |
| Sorong | 7.968 | 11,10 |
| Raja Ampat | 3.273 | 4,56 |
| Tambrau | 681 | 0,95 |
| Maybrat | 1.504 | 2,09 |
| Manokwari Selatan | 1.625 | 2,26 |
| Pegunungan Arfak | 537 | 0,75 |
| Kota Sorong | 22.376 | 31,16 |
| Papua Barat | 71.803 | 100,00 |



**UMK
SEBAGAI
PENYERAP
TENAGA KERJA
TERBANYAK**

Bagian

2

<https://papuabarat.bps.go.id>

Jumlah UMK yang sangat besar di Papua Barat tentunya sangat berperan untuk menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran. Berdasarkan data Sakernas dalam Publikasi Keadaan Pasar Tenaga Kerja 2017, pengangguran di Papua Barat mencapai 6,49 persen, terbanyak pada lulusan pendidikan menengah yang mencapai lebih dari 13,91 persen. Pada umumnya, tingginya kontribusi lulusan menengah terhadap jumlah pengangguran di Papua Barat, salah satunya disebabkan oleh rendahnya keahlian soft skill khususnya di tingkat SMK yang kualitas pendidikannya belum teruji.

Pembekalan keterampilan bagi angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah ini akan menjadi aksi yang sangat strategis agar mereka mampu menciptakan usaha sendiri. UMK merupakan salah satu wadah yang paling tepat untuk menampung para tenaga kerja yang tidak memiliki skill tinggi. Data SE2016-Lanjutan memberikan informasi bahwa UMK telah menyerap lebih dari 191 ribu, atau lebih dari 75 persen tenaga kerja nonpertanian di Papua Barat.

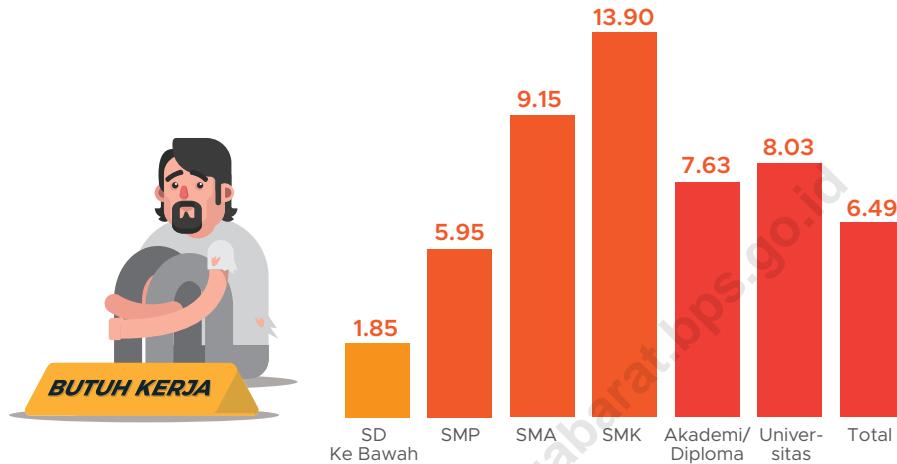
Penyerapan tenaga kerja UMK terjadi paling banyak pada usaha Perdagangan Besar dan

Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (kategori G) lebih dari 82 ribu jiwa atau mencapai lebih dari 43 persen dari tenaga kerja pada UMK. Usaha Konstruksi (kategori F), Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (kategori I), dan Usaha Pendidikan (Kategori P) menempati urutan kedua hingga keempat dalam penyerapan tenaga kerja pada UMK dengan persentase ketiganya di atas 11 persen.

Secara-rata-rata per usaha, UMK kategori Konstruksi (kategori F) memiliki penyerapan tenaga kerja tertinggi yaitu sekitar 29 pekerja per usaha/perusahaan. Namun secara umum, rata-rata penyerapan tenaga kerja UMK di Papua Barat hanya sebesar 3 pekerja.

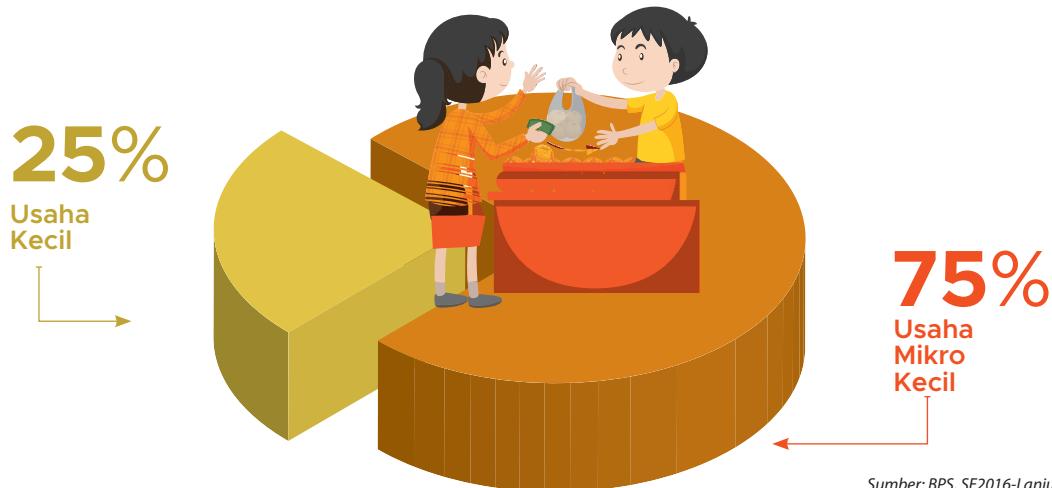
**UMK
SEBAGAI
PENYERAP
TENAGA
KERJA
TERBANYAK**

Gambar 2.1.
Tingkat Pengangguran Papua Barat menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Agustus 2017



Sumber: BPS, Sakernas

Gambar 2.2.
Penyerapan Tenaga Kerja Menurut Status Usaha, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 2.3.
Persentase Penyerapan Tenaga Kerja UMK Menurut Kategori, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 2.1.
Jumlah Usaha, Tenaga Kerja, dan Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja UMK Nonpertanian di Papua Barat Menurut Kategori, 2017

| Kategori | Jumlah Usaha | Jumlah Tenaga Kerja | Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja |
|--|---------------|---------------------|-----------------------------------|
| C. Industri Pengolahan | 4.523 | 13.273 | 3 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor | 39.796 | 82.729 | 2 |
| H. Pengangkutan dan pergudangan | 6.365 | 8.249 | 1 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum | 10.727 | 22.486 | 2 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 1.311 | 2.241 | 2 |
| L. Real Estat | 643 | 956 | 1 |
| M,N. Jasa Perusahaan | 1.049 | 2.838 | 3 |
| P. Pendidikan | 2.105 | 21.448 | 10 |
| R,S,U. Jasa Lainnya | 2.071 | 5.184 | 3 |
| Kategori Lainnya | 3.213 | 32.111 | 10 |
| Papua Barat | 71.803 | 191.515 | 3 |

**PENGELOLAAN
UMK
DILAKUKAN
SECARA
SEDERHANA**

Bagian

3

<https://papuabarat.bps.go.id>

PENGELOLAAN UMK DILAKUKAN SECARA SEDERHANA

Penerapan tenaga kerja yang besar UMK di Papua Barat memiliki karakteristik informal, yaitu usaha yang dicirikan dengan tidak adanya status badan hukum, tidak adanya sistem pencatatan keuangan, dijalankan dengan modal yang terbatas dan keahlian yang terbatas, serta penggunaan teknologi yang masih sederhana. Pengelolaan yang sederhana ini tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh UMK. Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja dan UMK adalah menjalin kemitraan dengan perusahaan yang lebih besar untuk mendapatkan pembinaan, bantuan modal, maupun lainnya. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan UMK sekaligus akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

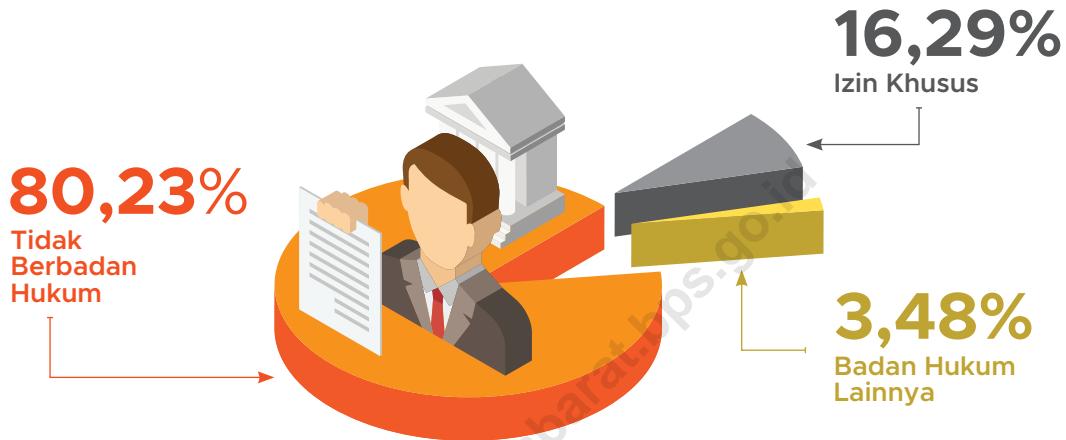
Dari data SE2016 menunjukkan bahwa pengelolaan UMK dilakukan secara sederhana tercermin dari status badan hukumnya, pencatatan keuangan, dan penggunaan komputer. Di Papua Barat, jumlah UMK yang tidak berbadan hukum masih sangat mendominasi yaitu mencapai 80,23 persen. Mayoritas UMK juga belum menggunakan komputer dan memanfaatkan internet. Komputer dan internet tidak hanya bermanfaat untuk melakukan laporan keuangan, juga bermanfaat untuk mendesain produk, pemasaran dan lain-lain. Sayangnya,

hanya kurang dari 7 persen UMK yang menggunakan komputer dan kurang dari 6 persen UMK yang memanfaatkan internet.

Untuk meningkatkan pendapatan UMK sekaligus meningkatkan daya saing produknya, kemitraan menjadi salah satu cara yang tepat. Namun demikian, usaha ini masih belum menjadi pilihan bagi UMK. Keterbatasan informasi menjadi salah satu kendala untuk menjalin kemitraan dengan perusahaan besar. Hanya sekitar 7 persen UMK yang menjalin kemitraan dengan perusahaan lain.

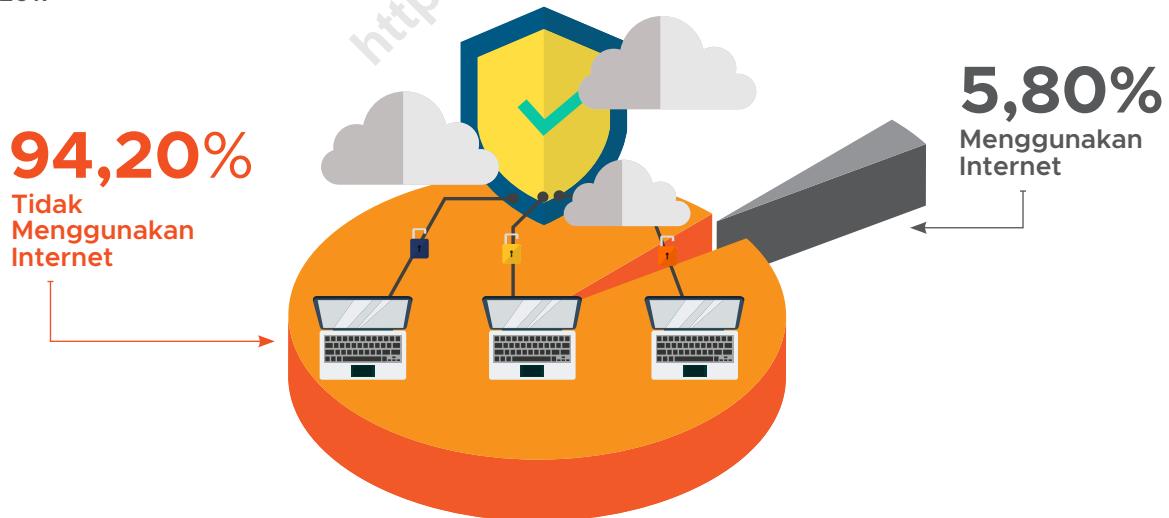
Di antara sektor Nonpertanian di Papua Barat, UMK pada kategori Pendidikan (kategori P) yang pengelolaannya paling baik. Hal ini tercermin dari variabel-variabel status badan hukum, penggunaan internet, dan penggunaan komputer. UMK Pendidikan tercatat mempunyai persentase tertinggi di antara kategori lainnya. Demikian pula dengan kemitraan, kategori inilah yang terbanyak persentasenya dalam hal menjalin kemitraan dengan usaha/perusahaan lainnya.

Gambar 3.1.
Persentase UMK Nonpertanian di Papua Barat Menurut Status
Badan Hukum, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.2.
Persentase UMK Nonpertanian di Papua Barat Menurut Penggunaan Internet,
2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 3.3.
Persentase UMK Nonpertanian di Papua Barat Menurut Penggunaan Komputer dalam Usaha, 2017



Gambar 3.4.
Persentase UMK Nonpertanian di Papua Barat Menurut Keikutsertaan dalam Kemitraan, 2017

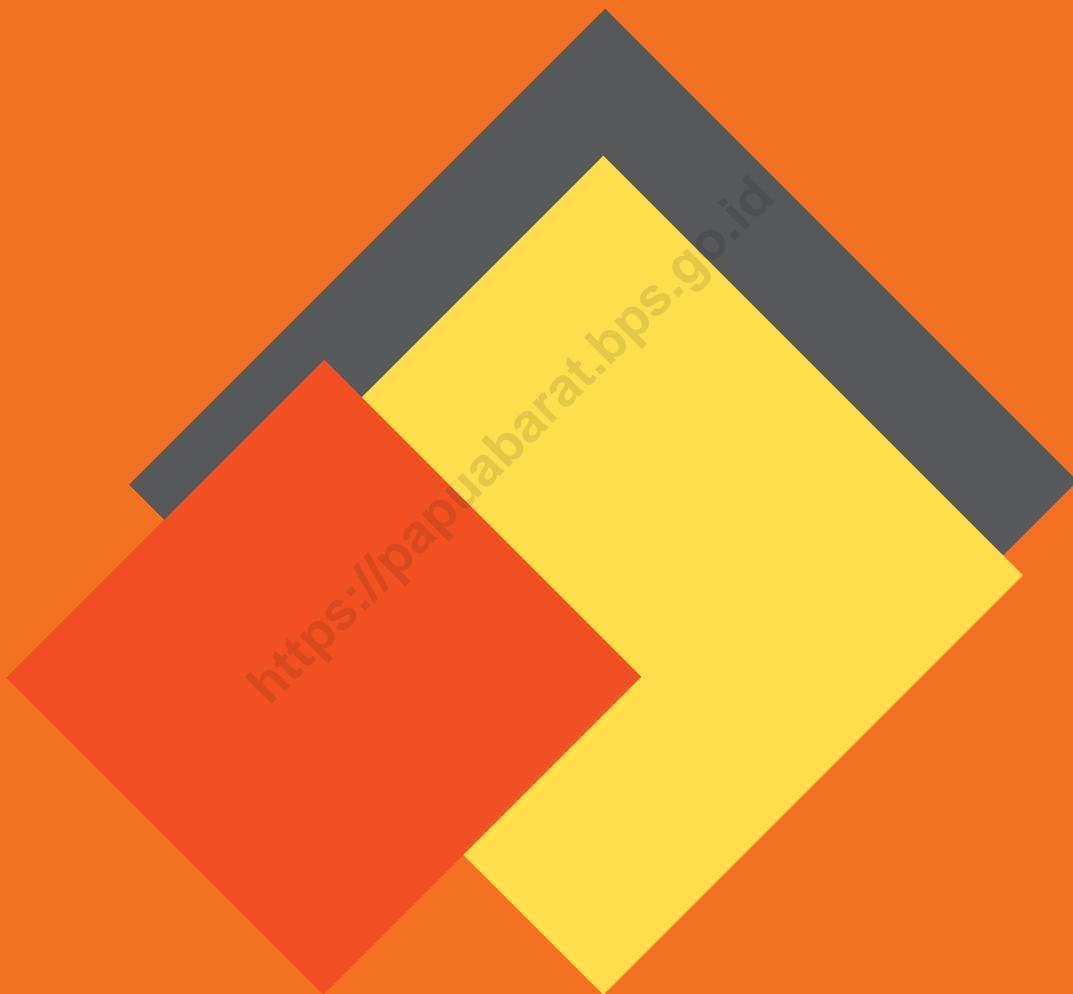


Tabel 3.1.

Persentase UMK Nonpertanian yang Berbadan Hukum, Menggunakan Internet, Menggunakan Komputer, dan Menjalin Kemitraan, 2017

| Kategori | Berbadan Hukum | Menggunakan Internet | Menggunakan Komputer | Menjalin Kemitraan |
|--|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| C. Industri Pengolahan | 17,55 | 4,95 | 3,58 | 8,87 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor | 17,50 | 3,84 | 2,99 | 7,89 |
| H. Pengangkutan dan pergudangan | 9,51 | 2,09 | 1,12 | 3,61 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum | 12,67 | 2,16 | 1,53 | 1,40 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 14,87 | 14,65 | 11,14 | 7,70 |
| L. Real Estat | 7,93 | 4,51 | 0,78 | 0,78 |
| M,N. Jasa Perusahaan | 36,32 | 38,99 | 47,95 | 12,96 |
| P. Pendidikan | 91,69 | 34,96 | 69,83 | 16,53 |
| R,S,U. Jasa Lainnya | 26,61 | 10,33 | 9,80 | 5,89 |
| Kategori Lainnya | 42,48 | 14,60 | 27,17 | 9,65 |
| Papua Barat | 19,77 | 5,08 | 6,66 | 6,88 |





<https://papuabarat.bps.go.id>

**PELAKU
UMK
MAYORITAS
PERORANGAN**

Bagian

4

<https://papuabarat.bps.go.id>

Salah satu faktor untuk keberhasilan usaha adalah sumber daya manusia yaitu pelaku usaha. Sebagian besar usaha dilakukan secara perorangan. Karena skala usaha yang kecil dan dilakukan secara sederhana, seluruh proses usaha atau produksi sampai pemasaran dilakukan sendiri oleh pengelola atau pengusaha. Untuk meningkatkan pendapatan UMK, pengelola harus mempunyai bekal dan pengetahuan mengenai bisnis usaha.

Peranan UMK dalam menggerakkan perekonomian tidak terlepas dari peran perempuan baik sebagai pengusaha maupun tenaga kerja. Secara umum, persentase pengusaha UMK yang berjenis kelamin perempuan sekitar 42 persen. Meskipun masih rendah dari laki-laki, persentase ini dianggap cukup tinggi mengingat masih berlakunya norma jika laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah. Berpijak dengan hal tersebut dapat diduga jika UMK juga dijalankan sebagai penunjang perekonomian keluarga.

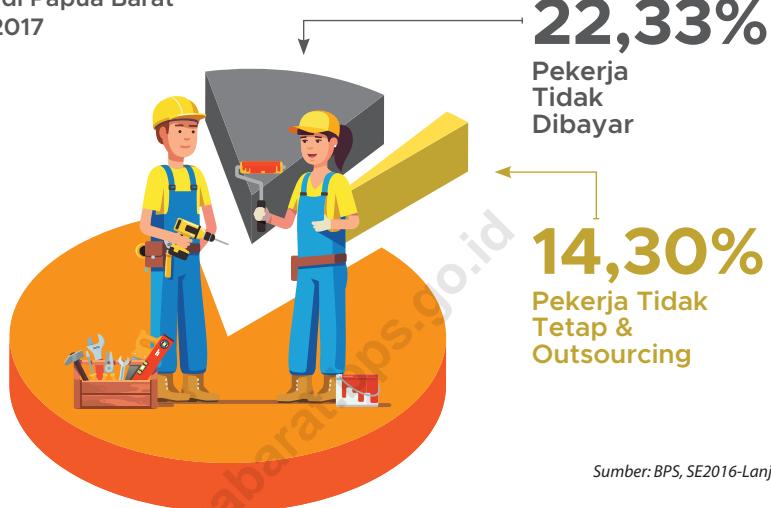
Secara umum kualitas pendidikan pengelola UMK masih rendah. Lebih dari sepertiga pengelola berpendidikan SMA, paling besar

diantara jenjang pendidikan lainnya. Pengelola dengan pendidikan SD ke bawah juga cukup besar mencapai sekitar hampir sepertiga. Masih rendahnya pendidikan pengelola UMK menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk memberikan bantuan bagi pelaku usaha ini seperti pelatihan-pelatihan.

**PELAKU
UMK
MAYORITAS
PERORANGAN**

Gambar 4.1.
Persentase UMK Nonpertanian di Papua Barat
Menurut Status Tenaga Kerja, 2017

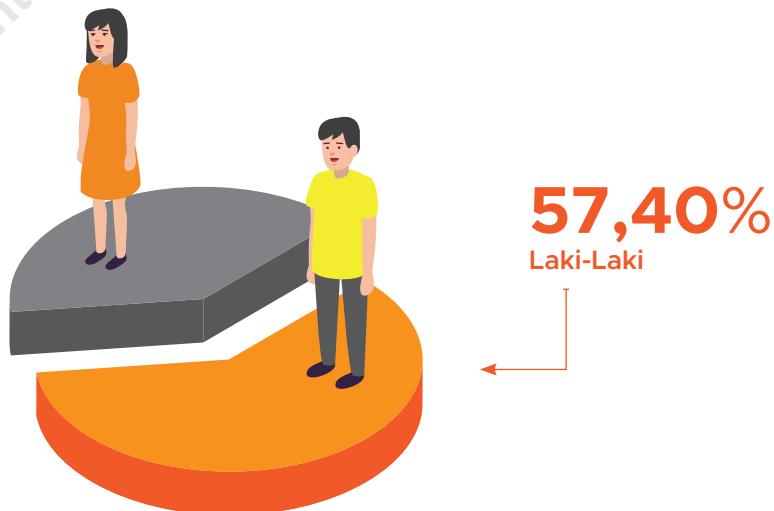
63,37%
Pekerja
Tetap &
Kontrak



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 4.2.
Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian di Papua Barat Menurut Jenis
Kelamin, 2017

42,60%
Perempuan



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 4.3.
Persentase Pengusaha UMK Nonpertanian di Papua Barat Menurut Pendidikan, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Tabel 4.1.
Persentase UMK Nonpertanian di Papua Barat Menurut Kategori dan Status Tenaga Kerja, 2017

| Kategori | Pekerja Tetap dan Kontrak | Pekerja Tidak Tetap dan Outsourcing | Pekerja Tidak Dibayar | Total |
|--|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|
| C. Industri Pengolahan | 63,02 | 17,58 | 19,40 | 100,00 |
| G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor | 61,21 | 3,59 | 35,20 | 100,00 |
| H. Pengangkutan dan pergudangan | 85,06 | 7,87 | 7,07 | 100,00 |
| I. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum | 67,86 | 1,80 | 30,34 | 100,00 |
| J. Informasi dan Komunikasi | 70,01 | 0,98 | 29,01 | 100,00 |
| L. Real Estat | 67,99 | 0,63 | 31,38 | 100,00 |
| M,N. Jasa Perusahaan | 76,43 | 10,15 | 13,42 | 100,00 |
| P. Pendidikan | 91,67 | 7,88 | 0,45 | 100,00 |
| R,S,U. Jasa Lainnya | 74,38 | 14,14 | 11,48 | 100,00 |
| Kategori Lainnya | 37,93 | 56,98 | 5,09 | 100,00 |
| Papua Barat | 63,37 | 14,30 | 22,33 | 100,00 |

AKSEBILITAS PERMODALAN UMK

Bagian

5

<https://papuabarat.bps.go.id>

AKSEBILITAS PERMODALAN UMK

Permodalan merupakan faktor produksi utama yang harus ada pada setiap proses produksi atau usaha. Seperti diketahui bahwa jumlah UMK mendominasi jumlah usaha di Papua Barat. Dengan kapasitas usaha yang relatif kecil, permodalan usaha ini masih banyak menggunakan modal sendiri. Padahal, sekitar 61,19 persen UMK menyatakan permodalan sebagai kendala dalam menjalankan bisnis. Oleh sebab itu, akses kredit dari lembaga keuangan merupakan hal yang penting. Hanya sekitar 16,20 persen usaha yang memperoleh/mengajukan kredit ke lembaga keuangan. Alasan UMK tidak menjadikan bank dan lembaga keuangan nonbank sebagai sumber pemberi modal/usaha utamanya adalah karena alasan bunga tinggi, tidak tahu prosedur dan tidak memiliki agunan.

Kebijakan pemerintah dalam pemberian akses kredit untuk UMKM sebetulnya sudah sangat terbuka. Oleh sebab itu, lembaga keuangan saat ini telah banyak memberikan berbagai jenis kredit yang meringankan. Bank Indonesia telah mewajibkan Bank Umum untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM (Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/12/PBI/2015). Namun demikian, karakteristik usaha tetap menjadi pertimbangan.

Keberadaan koperasi ikut berperan dalam

mendekatkan UMK untuk mengakses pembiayaan ke lembaga keuangan. UMK yang menjadi anggota koperasi memiliki seharusnya memiliki peluang yang lebih besar dalam memperoleh permodalan. UMK nonpertanian yang menjadi anggota koperasi di Papua Barat hanya mencakup 2,36 persen dari total seluruh UMK nonpertanian di Papua Barat. Angka ini cukup miris mengingat akses permodalan merupakan faktor produksi utama yang juga menjadi kendalanya UMK untuk berkembang.

Gambar 5.1.
 Persentase UMK di Papua Barat Menurut Akses terhadap
 Permodalan, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 5.2.
 Persentase UMK yang Tidak Mempunyai Akses ke Bank dan Lembaga
 Keuangan Non Bank di Papua Barat Menurut Alasannya (persen), 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 5.3.
Persentase UMK di Papua Barat Menurut Jenis Keanggotaan Koperasi, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

**KINERJA
USAHA
DARI SISI
KEUANGAN**

Bagian

6

<https://papuabarat.bps.go.id>

KINERJA USAHA DARI SISI KEUANGAN

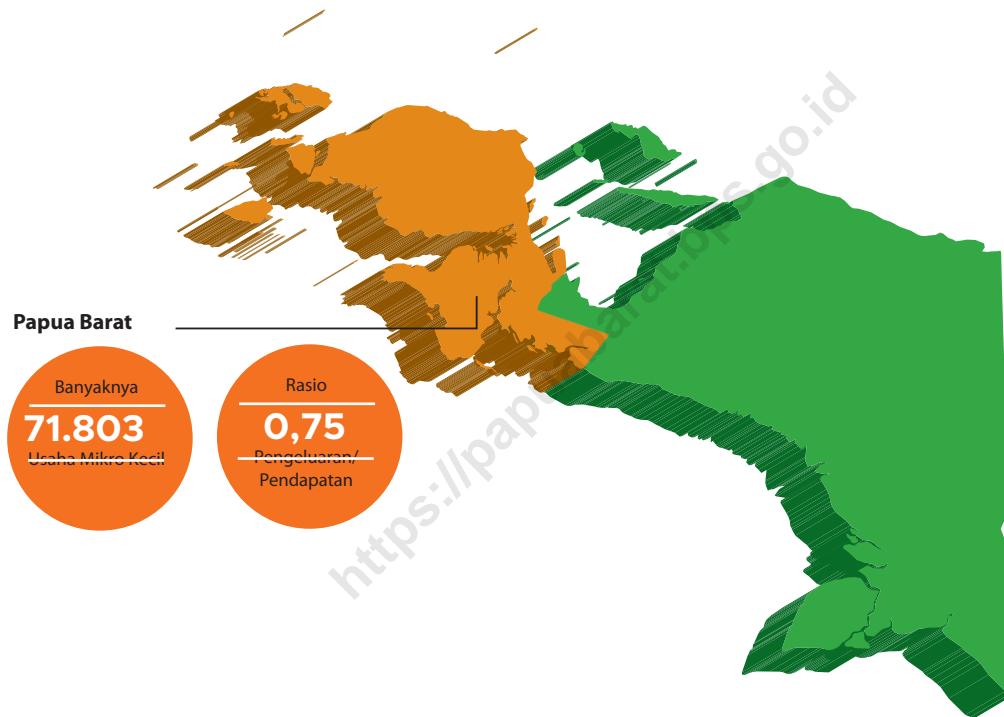
Kinerja usaha merupakan hasil dari kegiatan pemanfaatan sumber daya suatu usaha yang dapat diukur dengan beragam cara, salah satunya adalah laba usaha. Berdasarkan data hasil SE2016 Lanjutan, perolehan laba Usaha Mikro dan Kecil (UMK) menunjukkan capaian yang positif meskipun secara umum dipandang mengalami penurunan. Hampir sepertiga UMK di Papua Barat menyatakan bahwa keuntungan usaha mereka di tahun 2016 menurun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selain laba usaha, rasio *cost to income* juga digunakan untuk melihat tingkat efisiensi suatu usaha. Semakin rendah rasio suatu usaha maka semakin baik atau semakin menguntungkan usaha tersebut. Rasio pengeluaran terhadap pendapatan untuk UMK di Papua Barat mencapai 0,75. Artinya, keuntungan yang diperoleh dari setiap usaha mampu meraup keuntungan setidaknya seperempat kali lipat dari biaya yang dikeluarkan.

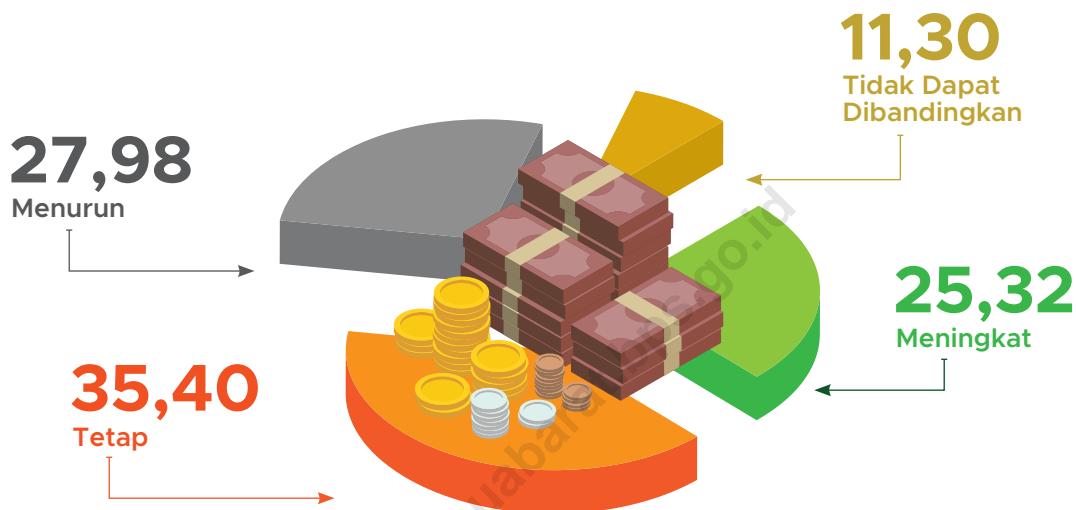
Jika dicermati lebih jauh menggunakan kategori lapangan usaha, kategori L (Real Estat) untuk sektor UMK merupakan kategori lapangan usaha yang paling menguntungkan dengan

rasio sebesar 0,19. UMK pada kategori tersebut mampu mendulang pendapatan hingga sekitar lima kali lipat biaya yang dikeluarkan. Sedangkan rasio pengeluaran terhadap pendapatan tertinggi disematkan pada kategori G (Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor) dengan rasio mencapai 0,83.

Gambar 6.1.
Banyaknya Usaha/Perusahaan dan Rasio Pengeluaran terhadap
Pendapatan UMK di Papua Barat, 2017

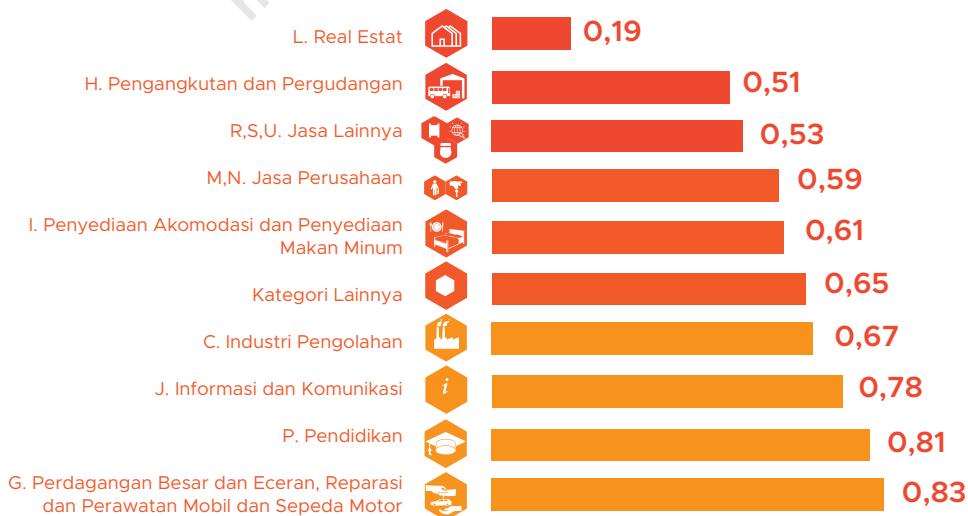


Gambar 6.2.
Persentase UMK menurut Kondisi Laba 2016 dibanding 2015



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 6.3.
Rasio Pendapatan terhadap Pengeluaran UMK di Papua Barat Menurut Lapangan Usaha, 2017



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

**PROSPEK
UMK DI
MASA
MENDATANG**

Bagian

7

<https://papuabarat.bps.go.id>

RPJMN 2005-2019 menargetkan adanya peningkatan usaha-usaha yang berpotensi tumbuh dan inovatif, yaitu usaha yang memiliki prospek bagus di masa mendatang. Dalam SE2016-Lanjutan, prospek adalah harapan atau kemungkinan, dalam hal ini prospek berkaitan dengan kondisi usaha atau tendensi bisnis ke depan baik dari sisi perolehan keuntungan, atau omset. Pada UMK, pengusaha atau pengelola yang menyatakan bahwa usaha mereka mempunyai prospek yang lebih baik di masa mendatang mencapai 51,69 persen. Sementara itu, masih terdapat 8,23 persen pengusaha yang pesimis dengan prospek usaha mereka mendatang dengan menyatakan kondisinya akan sama buruk atau lebih buruk dibanding tahun 2017.

Agar dapat menciptakan tendensi dan iklim bisnis yang lebih baik, tentu diperlukannya upaya pemecahan masalah terkait kendala yang dihadapi UMK dalam menjalankan usahanya. UMK di Papua Barat yang menyatakan memiliki kendala dalam menjalankan usahanya sebesar 79,37 persen. Kendala yang paling banyak dirasakan oleh pengusaha UMK adalah terkait permodalan/likuiditas yang mencapai 61,74 persen. Kendala lain yang juga cukup menyita perhatian para pengusaha adalah kekhawatiran

adanya pesaing dengan persentase 44,26 persen, dan menurunnya pemasaran dengan persentase 32,27 persen. Selanjutnya, ketersediaan bahan baku/barang dagangan juga tak ayal memberikan sumbangsih kendala bagi para pengusaha UMK ini dengan kontribusi yang cukup tinggi yaitu sebesar 21,31 persen.

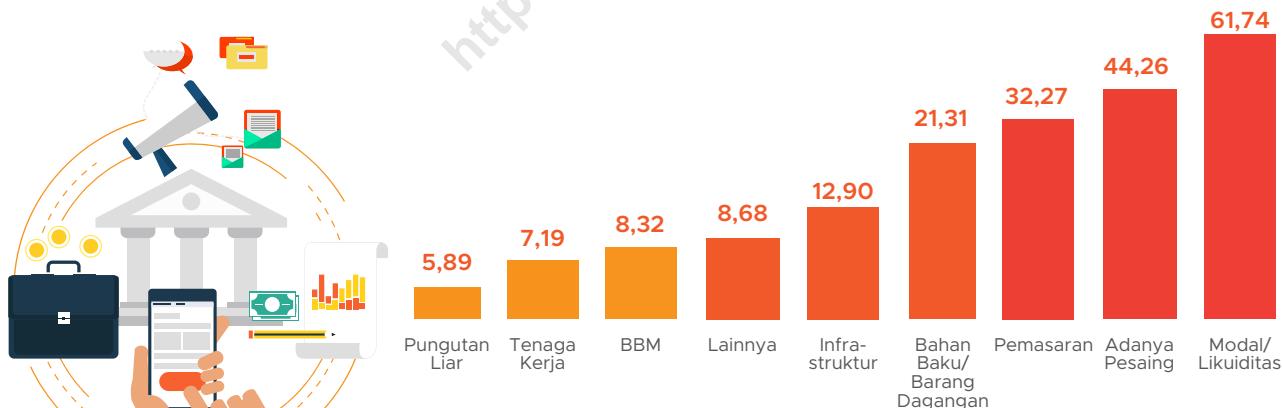
**PROSPEK
UMK DI MASA
MENDATANG**

Gambar 7.1.
 Persentase UMK di Papua Barat Menurut Prospek UMK Tahun
 Mendatang (tahun 2018)



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

Gambar 5.2.
 Persentase UMK Nonpertanian di Papua Barat Menurut Kendala yang Dihadapi,
 2016



Sumber: BPS, SE2016-Lanjutan

